

TANTANGAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Desri Noer Laily¹, Miftahir Rizqa^{2*}, Ratnaduhita Nabilah Azzahra³, Shinta Shavira⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12410522824@students.uin-suska.ac.id¹, miftahir.rizqa@uin-suska.ac.id^{2*},

12410523224@students.uin-suska.ac.id³, 12410523249@students.uin-suska.ac.id⁴

Abstrak

Pendidikan inklusif adalah bentuk pendidikan yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak belajar semua siswa secara setara, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh efektivitas administrasi pendidikan, yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, pembiayaan, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep administrasi pendidikan inklusif, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya, dan menjelaskan kontribusi supervisi pendidikan dan pendekatan manajemen humanistik dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan meninjau berbagai hasil penelitian dan referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, dukungan pendanaan yang kurang optimal, kompetensi guru yang perlu terus dikembangkan, dan kendala sosial dan budaya seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan munculnya stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, supervisi pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai sarana pengembangan profesional melalui implementasi supervisi klinis dan supervisi kolaboratif yang dapat meningkatkan kapasitas guru sekaligus memperkuat budaya sekolah inklusif. Selain itu, manajemen yang berorientasi pada nilai-nilai humanistik melalui optimalisasi sumber daya, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan adaptif yang menjawab beragam kebutuhan siswa.

Kata kunci: administrasi pendidikan inklusif, supervisi pendidikan, pendidikan inklusif, strategi manajemen, evaluasi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara serta menjadi instrumen penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun latar belakang lainnya. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mewujudkan pemerataan

kesempatan belajar adalah pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, mengikuti proses pembelajaran bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Melalui penerapannya, pendidikan inklusif berkontribusi dalam mewujudkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam penyelenggaraan.¹

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia telah memperoleh dukungan melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya di sekolah reguler. Keberadaan regulasi tersebut mencerminkan komitmen dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.²

Namun demikian, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), rendahnya kompetensi pendidik dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta adanya hambatan sosial dan budaya di lingkungan sekolah.³ Situasi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga memerlukan sistem administrasi pendidikan yang mampu mengelola kebutuhan peserta didik secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan administrasi pendidikan inklusif dalam upaya menjamin pemerataan akses dan mutu pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Selain itu, artikel ini juga mengkaji kontribusi supervisi pendidikan serta strategi pengelolaan yang humanis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

¹ Yessi Warminda, Hasrul, and Meri Haryani, "Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK Dan/Atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang," *Jurnal Basicedu* 6, no. 6 (2022): 9989–10003, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>.

² Warminda, Hasrul, and Haryani.

³ Vania Martha Yunita and Subagya, "Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah," *Jurnal Basicedu* 9, no. 5 (2025): 1549–58, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10712>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui berbagai referensi ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen akademik yang membahas administrasi pendidikan inklusif. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, tingkat kredibilitas sumber, serta relevansinya terhadap pembahasan mengenai tantangan dan strategi dalam pengelolaan pendidikan inklusif.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Literatur yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan tema kajian, meliputi konsep administrasi pendidikan inklusif, tantangan implementasi pendidikan inklusif, kontribusi supervisi pendidikan dalam mengatasi berbagai kendala, serta strategi pengelolaan yang berorientasi pada nilai-nilai humanis. Selanjutnya, berbagai temuan dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam, dibandingkan, dan disintesis guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai upaya mewujudkan kesetaraan akses serta peningkatan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik dalam lingkungan pendidikan inklusif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Administrasi Pendidikan Inklusif

Administrasi pendidikan inklusif merupakan proses pengelolaan seluruh komponen pendidikan yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan layanan pendidikan yang setara kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Administrasi ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan di sekolah inklusif.⁴ Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, administrasi pendidikan inklusif harus mampu menyesuaikan sistem sekolah dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.⁵ Administrasi pendidikan inklusif melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembelajaran, layanan khusus, serta pengelolaan keuangan sekolah.⁶

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Inklusif

⁴ Totok Yulianto, "Pendidikan Inklusif: Konsep Dasar, Ruang Lingkup, Dan Pembelajaran," *Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (2018): 195–206, <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1698>.

⁵ A. Hidayat, "Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif," *Jurnal Basicedu* 6, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>

⁶ R. Fadillah, "Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Pendidikan Inklusif di Sekolah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18731>

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Pengelolaan SDM meliputi perekrutan, penempatan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.⁷ Guru pada sekolah inklusif dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik. Selain itu, guru juga perlu memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai.⁸ Sekolah inklusif biasanya melibatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas membantu peserta didik berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran.

Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung seluruh warga sekolah.⁹ Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya agar tenaga pendidik mampu melaksanakan pembelajaran inklusif secara optimal.¹⁰

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah inklusif harus menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.¹¹ Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain ruang kelas yang ramah disabilitas, jalur kursi roda, toilet khusus, alat bantu pembelajaran, media pembelajaran adaptif, perpustakaan inklusif, serta fasilitas pendukung lainnya.¹²

Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan evaluasi penggunaan fasilitas sekolah. Dengan pengelolaan yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan nyaman bagi seluruh peserta didik.¹³

3. Pengelolaan Keuangan Pendidikan Inklusif

Pengelolaan keuangan dalam pendidikan inklusif bertujuan untuk mendukung seluruh program dan layanan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁴ Dana pendidikan inklusif dapat berasal dari pemerintah, bantuan operasional sekolah, sumbangan masyarakat, maupun sumber lain yang sah. Pengelolaan keuangan mencakup perencanaan

⁷ *Ibid.*

⁸ D. Kurniawan, "Pendidikan Inklusif: Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Pembelajaran," *Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1698>

⁹ Hidayat, A. *Op. cit.*

¹⁰ R. Fadillah. *Op. cit.*

¹¹ A. Suharsimi, "Administrasi Sekolah (Administrasi Keuangan Sekolah dan Sarana Prasarana)," *Jurnal Pendas* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.18929>

¹² Hidayat, A. *Op. cit.*

¹³ Suharsimi, A. *Op. cit.*

¹⁴ Suharsimi, A. *Op. cit.*

anggaran, penggunaan dana, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Dalam pendidikan inklusif, pengelolaan keuangan perlu memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik, seperti penyediaan alat bantu belajar, pelatihan guru, pengembangan fasilitas aksesibilitas, dan layanan pendukung lainnya.¹⁵ Kepala sekolah dan bendahara sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran secara tepat agar seluruh program pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

4. Landasan Yuridis Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang mendukung pendidikan inklusif antara lain:¹⁶ UUD 1945¹⁷ menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003¹⁸ menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, UU No. 8 Tahun 2016¹⁹ menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, Permendiknas No. 70 Tahun 2009²⁰ mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

B. Analisis Tantangan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapannya masih dihadapkan pada beragam hambatan yang berpotensi memengaruhi mutu layanan pendidikan. Berdasarkan telaah sejumlah literatur, kendala yang muncul tidak hanya terkait dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan, tetapi juga mencakup kapasitas tenaga pendidik serta aspek sosial dan budaya yang terbentuk dalam lingkungan sekolah.

Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan. Hasil penelitian Yunita dan Subagya (2025) menunjukkan bahwa sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kendala tersebut meliputi terbatasnya alat bantu pembelajaran, fasilitas aksesibilitas yang belum memadai, serta kurangnya dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan

¹⁵ Fadillah, R.

¹⁶ H. Ahyani et al., "Dasar Hukum dan Kebijakan Pendidikan Inklusi UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009," *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* (2024).

¹⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003).

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016).

²⁰ Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan masih dihadapkan pada hambatan struktural yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya pendukung.²¹

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Jannah dan Fadhillah (2025) yang menegaskan bahwa aksesibilitas lingkungan fisik sekolah masih menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Penyediaan fasilitas seperti jalur khusus bagi pengguna kursi roda, ruang belajar yang mendukung kenyamanan, serta lingkungan sekolah yang aman dan mudah diakses merupakan komponen yang perlu mendapat perhatian. Keberadaan sarana yang dirancang secara ergonomis tidak hanya meningkatkan kenyamanan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga mendorong keterlibatan mereka secara lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.²²

Berdasarkan temuan dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan struktural dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber pembiayaan, tetapi juga mencakup kemampuan sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas yang mudah diakses dan mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi unsur penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Di samping keterbatasan sarana dan dukungan pendanaan, kompetensi tenaga pendidik juga menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Penelitian Yunita dan Subagya (2025) menunjukkan bahwa jumlah guru yang memiliki kemampuan khusus untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus masih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya layanan pembelajaran dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.²³

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Ghasani et al. (2026) yang mengungkapkan bahwa guru reguler masih menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hambatan tersebut meliputi belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) sebagai tenaga pendukung dalam proses pembelajaran serta terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan pendidikan inklusif secara

²¹ Yunita and Subagya, "Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah."

²² Nur Baety Habibah Jannah and Lailaturrohman Fadhillah, "Manajemen Sarana Dan Prasarana: Analisis Ergonomis Sekolah Inklusif," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 5, no. 12 (2025): 8, <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i12.2025.8>.

²³ Yunita and Subagya, "Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah."

berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan guru harus menangani kebutuhan belajar yang beragam dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan.²⁴

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya terbatas pada kemampuan pedagogis untuk mengelola keberagaman peserta didik di dalam kelas. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan akan dukungan profesional serta pengembangan kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan. Tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan terbatasnya pelatihan pendidikan inklusif berpotensi mengurangi kemampuan guru dalam merancang serta menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Di samping tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana serta kompetensi tenaga pendidik, pelaksanaan pendidikan inklusif juga dihadapkan pada hambatan yang berasal dari aspek sosial dan budaya. Penelitian Dulisanti (2015) menunjukkan bahwa interaksi antara siswa reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak terjadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sementara itu, hubungan sosial di luar proses pembelajaran masih tergolong terbatas, sehingga partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial sekolah belum berkembang secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif.²⁵

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nahampun et al. (2025) yang mengemukakan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan sosial. Salah satu kendala yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dan warga sekolah mengenai konsep pendidikan inklusif. Selain itu, keberadaan stigma serta pandangan yang kurang tepat terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dapat memengaruhi tingkat penerimaan dan keterlibatan mereka dalam lingkungan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada aspek akademik dan pengelolaan sekolah, tetapi juga pada terciptanya budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dan inklusivitas.²⁶

Berdasarkan hasil kajian dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan budaya dan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat berkaitan dengan tingkat

²⁴ Azmi Ghasani, Zoni Sulaiman, and Dani Gunawan, "Tantangan Guru Reguler Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif: Studi Kasus Di Sekolah Dasar," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45529>.

²⁵ Reza Dulisanti, "Penerimaan Sosial Dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri 2 Malang)," *Indonesian Journal of Disability Studies* 2, no. 1 (2015): 52–60, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2015.02.01.05>.

²⁶ Debi Yanti Nahampun et al., "Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Studi Pustaka Atas Perkembangan, Tantangan, Dan Strategi Implementasi," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 596–605, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i2.26923>.

penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Interaksi sosial yang masih terbatas antara siswa reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, disertai dengan keberadaan stigma terhadap keberagaman, menunjukkan bahwa penguatan budaya sekolah yang inklusif masih menjadi kebutuhan penting. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keterlibatan seluruh peserta didik secara setara.

Berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian, dapat dipahami bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki keterkaitan yang erat antara satu aspek dengan aspek lainnya. Keterbatasan pendanaan tidak hanya berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga memengaruhi upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Di sisi lain, hambatan budaya dan sosial, termasuk rendahnya tingkat penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, turut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan menyeluruh untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

C. Peran Supervisi Pendidikan dalam Menjawab Tantangan

1. Supervisi sebagai Dukungan, Bukan Inspeksi

Supervisi pendidikan sangat penting untuk pendidikan inklusif karena membantu sekolah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana, kekurangan guru, dan hambatan sosial dan budaya. Supervisi sekarang dianggap sebagai proses pendampingan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan daripada sebagai kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk melacak kesalahan guru. Mengajar di kelas inklusif membutuhkan dukungan yang lebih intensif dari guru untuk menghadapi keberagaman dan kebutuhan peserta didik, yang membuat pendekatan ini penting.

Menurut Hasibuan, supervisi akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk membantu sekolah mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan berbagai siswa. Dengan supervisi yang konstruktif, kepala sekolah dan pengawas dapat membantu guru menemukan masalah dalam proses pembelajaran dan membuat solusi yang sesuai dengan keadaan sekolah.²⁷

Menurut Iqbal et al., supervisi di sekolah inklusif seharusnya berfokus pada meningkatkan kemampuan guru melalui pembinaan yang berkelanjutan, pendampingan profesional, dan umpan balik reflektif. Metode ini membuat guru merasa didukung saat

²⁷ Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan, "The Role of Academic Supervision in Improving the Effectiveness of Inclusive Education Governance," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 3, no. 5 (2024): 2017–25, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.341>.

menjalankan tugasnya, yang membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran inklusif.²⁸

2. Supervisi Klinis sebagai Solusi Penguatan Kompetensi Guru

Supervisi klinis adalah salah satu bentuk supervisi yang relevan dalam pendidikan inklusif. Supervisi klinis adalah proses pembinaan yang dilakukan secara sistematis melalui observasi pembelajaran, analisis masalah, dan pemberian umpan balik dengan tujuan membantu guru meningkatkan kualitas praktik mengajar mereka. Pendekatan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam pendidikan inklusif karena memungkinkan supervisor memberikan bantuan yang lebih spesifik terhadap masalah tertentu.

Menurut Rugaiyah, supervisi klinis dilakukan dalam beberapa langkah. Ini termasuk pertemuan awal (pra-observasi), observasi pembelajaran, analisis hasil observasi, pertemuan balikan (post-observasi conference), dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Selama langkah-langkah ini, guru dan supervisor dapat bekerja sama untuk menemukan masalah yang terjadi selama proses pembelajaran dan membuat strategi untuk memperbaikinya.²⁹

Supervisi klinis dapat digunakan oleh guru dalam pendidikan inklusif untuk membantu mereka membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Misalnya, supervisor dapat membantu guru dalam membuat IEP, memilih pendekatan diferensiasi pembelajaran, menentukan jenis asesmen yang tepat, dan mengawasi interaksi sosial antara siswa dan orang lain di kelas. Oleh karena itu, supervisi klinis meningkatkan kinerja guru dan memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa berkebutuhan khusus.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Donath et al., program pengembangan profesional yang dilakukan secara berkelanjutan berkontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif dan meningkatkan kemampuan guru dalam menangani keberagaman siswa. Hasil ini menegaskan bahwa supervisi klinis sebagai bagian dari pengembangan profesional guru yang berkelanjutan sangat penting.³⁰

Berdasarkan berbagai hasil, dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis adalah pendekatan yang efektif untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar inklusif. Guru dapat meningkatkan kemampuan pedagogisnya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam melalui proses pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan.

²⁸ Muhammad Iqbal et al., "Supervisi Pendidikan Di Sekolah Inklusif: Tantangan Dan Solusinya," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 5 (2024): 6006–17, <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i5.1911>.

²⁹ Rugaiyah, "Pengembangan Model Supervisi Klinis Berbasis Informasi Dan Teknologi," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.21831/cp.v3i5i3.10429>.

³⁰ Johanna L. Donath et al., "Does Professional Development Effectively Support the Implementation of Inclusive Education? A Meta-Analysis," *Educational Psychology Review* 35, no. 30 (2023): 1–30, <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09752-2>.

3. Supervisi Kolaboratif dalam Membangun Budaya Inklusif

Pendekatan supervisi kolaboratif, yang menekankan kerja sama antara kepala sekolah, guru, pengawas, Guru Pendamping Khusus (GPK), dan semua orang lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, lebih penting daripada supervisi klinis. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa masalah pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja; sebaliknya, itu membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Menurut Aprilia et al., supervisi kolaboratif adalah metode supervisi yang melibatkan guru sebagai partner dalam proses meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan guru dan supervisor bekerja sama untuk menemukan masalah, membuat solusi, dan secara reflektif mengevaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran. Metode-metode ini dapat mendorong hubungan profesional yang lebih terbuka dan mendukung pengembangan berkelanjutan kemampuan guru.³¹

Pembentukan komunitas belajar guru, juga dikenal sebagai PLC, memungkinkan penerapan supervisi kolaboratif. Komunitas belajar memberikan guru kesempatan untuk berbicara, berbagi pengalaman, dan saling memberikan masukan tentang praktik pembelajaran inklusif. Kegiatan ini dapat membantu guru memecahkan berbagai masalah ketika mereka menjalankan kelas yang heterogen.

Menurut penelitian Johansson dan Herrebrøden, komunitas belajar profesional membantu membangun budaya sekolah yang lebih inklusif dengan meningkatkan kerja sama, rasa percaya, dan tanggung jawab kolektif untuk mendukung keberhasilan semua siswa.³² Suyanto et al., juga menemukan bahwa supervisi kolaboratif dan komunitas belajar dapat mendorong perubahan budaya sekolah yang lembut.³³

Supervisi kolaboratif dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai inklusif di lingkungan sekolah jika dikaitkan dengan masalah budaya dan sosial yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus dapat dikurangi melalui forum refleksi dan diskusi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ini akan menghasilkan lingkungan belajar yang lebih ramah dan menerima keberagaman.

³¹ Fira Wulandari Aprilia et al., "Sinergi Pendekatan Dan Teknik Supervisi Pendidikan: Kajian Komparatif Efektivitas Supervisi Klinis Dan Kolaboratif Dalam Peningkatan Mutu Guru," *Jurnal DIALOGIKA Manajemen Dan Administrasi* 6, no. 2 (2025): 166–74, <https://doi.org/10.31949/dialogika.v6i2.16959>.

³² Veslemøy Maria Fossum Johansson and Marte Karoline Herrebrøden, "Cultivating Inclusive Schools: The Role of Extended Professional Learning Communities," *Educational Research* 67, no. 4 (2025): 442–60, <https://doi.org/10.1080/00131881.2025.2548263>.

³³ Suyanto Suyanto, Fakhruddin Fakhruddin, and Muhammad Khafid, "Empowering Inclusive and Sustainable Educational Transformation Through Learning Communities and School Supervision," *International Conference on Science, Education and Technology* 11, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.159607>.

Jadi, supervisi kolaboratif tidak hanya membantu guru menjadi lebih baik, tetapi juga membangun budaya sekolah yang mendukung pendidikan inklusif.

D. Strategi Pengelolaan yang Humanis

1. Strategi Manajemen dalam Mendukung Pendidikan Inklusif

Berdasarkan berbagai masalah yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, jelas bahwa pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan guru yang siap untuk mengajar. Ini juga membutuhkan sistem pengelolaan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari siswa. Oleh karena itu, rencana manajemen pendidikan inklusif harus berfokus pada manajemen sumber daya yang baik, peningkatan kemampuan guru, dan pembentukan budaya sekolah yang mendukung inklusi.

Dalam konteks ini, kepala sekolah memegang peran strategis sebagai pengelola pendidikan, yang berarti mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan secara keseluruhan. Menurut Sukinah, implementasi pendidikan inklusif memerlukan manajemen strategik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan inklusif tercapai secara optimal.³⁴ Jadi, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga bagaimana sekolah mengelola berbagai sumber daya.

Layanan pendidikan inklusif secara langsung didukung oleh anggaran sekolah, yang merupakan strategi yang dapat digunakan. Program sekolah yang paling penting harus mencakup aksesibilitas fasilitas, pembelajaran adaptif, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus(sari rudyati).³⁵ Strategi ini sangat penting karena penelitian telah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan dana terus menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai pendidikan inklusif.

Di samping itu, untuk mencapai pendidikan inklusif, sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait harus bekerja sama satu sama lain. Kolaborasi sangat penting karena sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara mandiri. Sekolah dapat memperoleh dukungan sumber daya, informasi, dan layanan profesional yang membantu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui kerja sama yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pendekatan pengelolaan pendidikan inklusif harus berfokus pada mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, dan mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan. Sekolah dapat

³⁴ Sukinah, "Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Khusus* 7, no. 2 (2020): 40–51, <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i2.777>.

³⁵ Sari Rudyati, "Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusif Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus melalui Pembelajaran Kolaboratif," *Cakrawala Pendidikan*, 2019.

memberikan layanan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam dengan metode ini.

2. Evaluasi Berkelanjutan sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif membutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi adalah bagian penting dari administrasi pendidikan karena membantu mengetahui seberapa baik program memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai tujuan.

Dalam pendidikan inklusif, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa; itu juga mencakup kualitas layanan pendidikan, efektivitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas, kemampuan tenaga pendidik, dan tingkat partisipasi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menemukan berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan.

Khoeriah menjelaskan bahwa evaluasi kinerja sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepemimpinan sekolah, fokus pada kebutuhan siswa, pengelolaan kelas inklusif, kualitas tenaga pendidik, dan hasil layanan pendidikan yang diberikan. Evaluasi menyeluruh memungkinkan sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa efektif mereka memenuhi kebutuhan siswa.³⁶

Sangat penting bahwa evaluasi dilakukan secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini karena kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dapat berubah seiring dengan perkembangan kemampuan mereka dan kondisi lingkungan belajar mereka. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan dan program tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, penilaian pendidikan inklusif harus melibatkan semua orang: guru, orang tua, kepala sekolah, dan tenaga pendukung lainnya. Metode partisipatif memungkinkan sekolah mengumpulkan informasi yang lebih beragam tentang cara menjalankan program pendidikan inklusif. Proses evaluasi tidak hanya menjadi alat pengawasan tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan layanan pendidikan.

Menurut penelitian Chairul Anwar et al., evaluasi kebijakan pendidikan inklusif harus dilakukan secara berkelanjutan karena berbagai tantangan struktural maupun kultural masih menghalangi pelaksanaan program ini, yang menuntut perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh dianggap sebagai kegiatan administratif semata. Sebaliknya, harus

³⁶ N Dede Khoeriah, "Pengembangan Model Evaluasi Kinerja SD Penyelenggara Pendidikan Inklusif," *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 17, no. 1 (2013): 37–54, <https://doi.org/10.21831/pep.v17i1.1360>.

dianggap sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pengembangan program pendidikan yang inklusif.³⁷

Oleh karena itu, evaluasi terus menerus merupakan langkah penting menuju pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Sekolah dapat terus memperbaiki layanan pendidikan mereka dan membuat lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkualitas.

KESIMPULAN

Administrasi pendidikan inklusif memainkan peran strategis dalam memastikan penyampaian layanan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, melalui pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, pembiayaan, dan layanan pendukung yang menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Meskipun implementasinya di Indonesia didukung oleh peraturan yang menjamin hak setiap siswa untuk menerima pendidikan berkualitas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, dukungan anggaran yang kurang optimal, kompetensi pendidik dalam memenuhi beragam kebutuhan belajar, dan hambatan sosial dan budaya seperti kurangnya pemahaman dan masih adanya stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, supervisi pendidikan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan melalui pembinaan guru dan pengembangan profesional, didukung oleh implementasi supervisi klinis dan kolaboratif serta strategi manajemen humanistik melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., et al. "Dasar Hukum dan Kebijakan Pendidikan Inklusi UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009." *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* (2024).
- Anwar, Chairul, Laili Komariyah, Ahmad Aznem, Hasbar, Lidyawati Tandi Payung, and Agus Heri Kesuma. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Pendekatan CIPP Dan Perspektif Keadilan Sosial." *Journal of Education Research* 6, no. 3 (2025): 739–50. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>.
- Aprilia, Fira Wulandari, Nur Fitria, Novia Hilda Fitri Arrahmah, and Mas Muhammad Ulinnuha Arwani. "Sinergi Pendekatan Dan Teknik Supervisi Pendidikan: Kajian Komparatif Efektivitas Supervisi Klinis Dan Kolaboratif Dalam Peningkatan Mutu

³⁷ Chairul Anwar et al., "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Pendekatan CIPP Dan Perspektif Keadilan Sosial," *Journal of Education Research* 6, no. 3 (2025): 739–50, <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>.

- Guru.” *Jurnal DIALOGIKA Manajemen Dan Administrasi* 6, no. 2 (2025): 166–74. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v6i2.16959>.
- Donath, Johanna L., Timo Lüke, Elisabeth Graf, Ulrich S. Tran, and Thomas Götz. “Does Professional Development Effectively Support the Implementation of Inclusive Education? A Meta-Analysis.” *Educational Psychology Review* 35, no. 30 (2023): 1–30. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09752-2>.
- Dulisanti, Reza. “Penerimaan Sosial Dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri 2 Malang).” *Indonesian Journal of Disability Studies* 2, no. 1 (2015): 52–60. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2015.02.01.05>.
- Fadillah, R. “Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Pendidikan Inklusif di Sekolah.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18731>
- Ghasani, Azmi, Zoni Sulaiman, and Dani Gunawan. “Tantangan Guru Reguler Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif: Studi Kasus Di Sekolah Dasar.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45529>.
- Hasibuan, Zulpan Syarif Supriadi. “The Role of Academic Supervision in Improving the Effectiveness of Inclusive Education Governance.” *TOFEDU: The Future of Education Journal* 3, no. 5 (2024): 2017–25. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.341>.
- Hidayat, A. “Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016.
- Iqbal, Muhammad, Az Zahra Nur Fadila, Selsha Amalia, and Suci Julianti Nasution. “Supervisi Pendidikan Di Sekolah Inklusif: Tantangan Dan Solusinya.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 5 (2024): 6006–17. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i5.1911>.
- Jannah, Nur Baety Habibah, and Lailaturrohman Fadhillah. “Manajemen Sarana Dan Prasarana: Analisis Ergonomis Sekolah Inklusif.” *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 5, no. 12 (2025): 8. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i12.2025.8>.
- Johansson, Veslemøy Maria Fossum, and Marte Karoline Herrebrøden. “Cultivating Inclusive Schools: The Role of Extended Professional Learning Communities.” *Educational Research* 67, no. 4 (2025): 442–60. <https://doi.org/10.1080/00131881.2025.2548263>.
- Khoeriah, N Dede. “Pengembangan Model Evaluasi Kinerja SD Penyelenggara Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 17, no. 1 (2013): 37–54. <https://doi.org/10.21831/pep.v17i1.1360>.
- Kurniawan, D. “Pendidikan Inklusif: Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Pembelajaran.”

- Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1698>
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009.
- Nahampun, Debi Yanti, Fatma Nabila, Nabila Br Surbakti, Erra Fazira MT, Afif Arahman, and Lili Tansliova. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Studi Pustaka Atas Perkembangan, Tantangan, Dan Strategi Implementasi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 596–605. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i2.26923>.
- Rudiyati, Sari. "Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusif Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus melalui Pembelajaran Kolaboratif." *Cakrawala Pendidikan*, 2019.
- Rugaiyah. "Pengembangan Model Supervisi Klinis Berbasis Informasi Dan Teknologi." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.21831/cp.v35i3.10429>.
- Suharsimi, A. "Administrasi Sekolah (Administrasi Keuangan Sekolah dan Sarana Prasarana)." *Jurnal Pendas* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.18929>
- Sukinah. "Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif." *Jurnal Pendidikan Khusus* 7, no. 2 (2020): 40–51. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i2.777>.
- Suyanto, Suyanto, Fakhruddin Fakhruddin, and Muhammad Khafid. "Empowering Inclusive and Sustainable Educational Transformation Through Learning Communities and School Supervision." *International Conference on Science, Education and Technology* 11, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.159607>.
- Warminda, Yessi, Hasrul, and Meri Haryani. "Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK Dan/Atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang." *Jurnal Basicedu* 6, no. 6 (2022): 9989–10003. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>.
- Yulianto, Totok. "Pendidikan Inklusif: Konsep Dasar, Ruang Lingkup, Dan Pembelajaran." *Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (2018): 195–206. <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1698>.
- Yunita, Vania Martha, and Subagya. "Hambatan Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Analisis Berbasis Survei 156 Sekolah." *Jurnal Basicedu* 9, no. 5 (2025): 1549–58. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10712>.